

Pengaruh Realisasi Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Anggun¹, Nur Indah Sari²

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: anggunn3010@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: sarinurindah177@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
30-01-2024

Direvisi:
12-02-2024

Diterima:
29-02-2024

ABSTRACT

National borders were originally a geographical concept that became the main manifestation of a country's territorial sovereignty. The never-ending problem of poverty has always been a special and main concern in Indonesia. The Indonesian government is aware that its failure to overcome the problem of poverty has resulted in many social, economic and political problems emerging among Indonesian society. West Kalimantan shares a land border with the state of Sarawak, Malaysia. There are five areas of West Kalimantan that directly border Malaysia, namely Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau and Kapuas Hulu. The aim of this research is to find out whether there is an influence of regional expenditure realization on poverty levels in the border areas of West Kalimantan Province in 2013-2033. This research uses quantitative research methods. The analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis using the Statistical Program for Social Science (SPSS). Based on the results of the research and calculations used by carrying out linear regression test calculations, we get a negative result (-) on the variable ,00001800. The partial significance test (t test) on the regional expenditure realization variable shows that the significance value (sig) is smaller than 0.05 ($0.000 < 0.05$). Furthermore, the simultaneous test (f test) carried out obtained a significance value (sig) that was smaller than 0.05 ($0.000 < 0.05$). Furthermore, the coefficient of determination test carried out in this research shows an R-Square result of 0.361, which means that the realization of regional expenditure (X) has a contribution of 36.1% (low) to the poverty level (Y) and 63.9% is influenced by other factors not discussed in this study. From the research that has been conducted, it can be concluded that the realization of regional expenditure has an influence on the level of poverty in the border areas of West Kalimantan Province in 2013-2022.

Keywords : Poverty, Realization of Expenditures, National Borders

ABSTRAK

Perbatasan negara pada awalnya merupakan konsep geografis yang menjadi manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Masalah kemiskinan yang tidak kunjung usai selalu menjadi perhatian khusus dan utama di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sadar bahwa kegagalan dalam mengatasi persoalan tentang kemiskinan ini yang mengakibatkan banyak muncul persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ada lima daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2033. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif menggunakan Statistical Profram for Social Science (SPSS). Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang digunakan dengan melakukan perhitungan uji regresi linier mendapatkan hasil negatif (-) pada variabel X (Realisasi belanja daerah) sebesar -0,00001800, yang artinya apabila realisasi belanja daerah naik sebanyak 1 satuan, maka jumlah kemiskinan menurun

sebanyak 0,00001800. Uji signifikansi parsial (uji t) pada variabel realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selanjutnya uji simultan (uji f) yang dilakukan mendapatkan nilai signifikansi (sig) yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selanjutnya pada uji koefisien determinasi yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil R-Square sebesar 0,361 yang mengandung pengertian bahwa realisasi belanja daerah (X) memiliki kontribusi sebesar 36,1% (rendah) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dan 63,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.

Kata Kunci : Kemiskinan, Realisasi Belanja, Perbatasan Negara

Corresponding Author : Nur Indah Sari, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: sarinurindah177@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbatasan negeri pada awal mulanya menggambarkan konsep geografis yang sebagai perwujudan utama kedaulatan daerah suatu negeri. Kawasan perbatasan menggambarkan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari daerah yang dibangun melalui Undang- Undang karena sangat berarti serta mendasar karena mempunyai kemampuan besar; akan tetapi, kawasan perbatasan juga mengalami permasalahan mendasar, yakni kemiskinan (Bangun, 2017). Masalah kemiskinan yang tidak kunjung usai selalu menjadi perhatian khusus dan utama di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sadar bahwa kegagalan dalam mengatasi persoalan tentang kemiskinan ini yang mengakibatkan banyak muncul persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selama Orde Baru, pemerintah melakukan upaya yang sangat besar dan serius untuk memerangi kemiskinan. Selama periode 1976-1996 (Repelita II-V), tingkat kemiskinan di Indonesia turun drastis dari 40% pada awal Repelita II menjadi "hanya" 11% pada awal Repelita V (Novianti & Sari, 2023). Solusi atau kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena kemiskinan ini merupakan penyakit sekaligus masalah ekonomi. Salah satu permasalahan yang sangat rumit serta kompleks yaitu kemiskinan. Dampaknya, upaya untuk mengurangi kemiskinan mesti dilakukan secara merata serta terpadu. Kemiskinan di Indonesia sudah sebagai permasalahan yang senantiasa menjadi atensi sejak saat ini. Kemiskinan di sesuatu negeri wajib dicermati sebagai permasalahan yang sangat serius, karena kemiskinan membuat banyak warga kesusahan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka (Yulianto, 2023).

Kalimantan Barat merupakan sebuah provinsi yang dijuluki "Seribu Sungai". Julukan ini sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil. Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ada lima daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu (Pemerintah Provinsi Kalbar, 2019). Secara umum, daerah perbatasan Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, pertanian, dan perikanan. Namun, aksesibilitas yang terbatas dan infrastruktur masih menjadi kendala pemerintah Kalimantan Barat karena adanya infrastruktur yang kurang memadai di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi daerah perbatasan Kalimantan Barat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta program-program pemberdayaan masyarakat. Namun, masih diperlukannya upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (Pemerintah Provinsi Kalbar, 2022).

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Lutfi Maulana Hasanudin dengan judul "Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Daerah, Besaran UMK, Inflasi, dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2017", mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan (Hasanudin, 2019). Penelitian kedua, oleh Wahyudi dengan judul "Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia", yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah provinsi yang terealisasikan untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan (Wahyudi, 2020). Penelitian ketiga, oleh Helmi Winda Wati dengan judul "Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)", mendapatkan hasil bahwa

variabel belanja daerah yang terealisasikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Wati, 2015).

Salah satu penanda keberhasilan disuatu wilayah perbatasan dalam kesejahteraan penduduk yaitu dengan meningkatnya perkembangan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan PDRB dari tahun ke tahun, salah satu aspek meningkatnya PDRB merupakan menyusutnya jumlah kemiskinan dari tahun ke tahun. Kemiskinan dapat dikatakan turun apabila kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang dilihat dari akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat (Putri dkk., 2021). Kesejahteraan masyarakat yang tinggi menjadi salah satu hal yang selalu ingin dicapai oleh semua negara maupun daerah, termasuklah daerah perbatasan.

Tabel 1. Data Realisasi Belanja dan Jumlah Kemiskinan Lima Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2022

No	KAB/KOTA	TAHUN	Realisasi Belanja Daerah (Ribu Rupiah)	Jumlah Kemiskinan (Ribu jiwa)
1	Sambas	2013	1.039.619.502	51.200
2	Bengkayang	2013	620.299.719	18.400
3	Sintang	2013	1.075.556.247	39.000
4	Sanggau	2013	989.383.319	20.400
5	Kapuas Hulu	2013	1.046.895.750	26.400
1	Sambas	2014	1.174.144.328	49.300
2	Bengkayang	2014	806.042.638	16.900
3	Sintang	2014	1.141.361.438	35.700
4	Sanggau	2014	1.053.233.782	19.700
5	Kapuas Hulu	2014	1.166.456.511	24.300
1	Sambas	2015	1.511.634.278	49.290
2	Bengkayang	2015	1.063.661.124	16.490
3	Sintang	2015	1.700.909.625	36.830
4	Sanggau	2015	1.362.317.621	20.260
5	Kapuas Hulu	2015	1.568.656.547	23.740
1	Sambas	2016	1.421.885.401	44.880
2	Bengkayang	2016	899.326.378	18.040
3	Sintang	2016	1.481.302.835	40.360
4	Sanggau	2016	1.663.612.737	20.270
5	Kapuas Hulu	2016	1.421.570.043	24.490
1	Sambas	2017	1.638.897.259	45.420
2	Bengkayang	2017	1.089.672.442	18.840
3	Sintang	2017	1.884.197.672	41.460
4	Sanggau	2017	1.535.396.866	20.620
5	Kapuas Hulu	2017	1.651.954.428	23.960
1	Sambas	2018	1.701.221.066	45.480
2	Bengkayang	2018	1.003.654.006	17.940
3	Sintang	2018	1.870.318.612	42.650

4	Sanggau	2018	1.500.872.589	21.590
5	Kapuas Hulu	2018	1.722.177.313	24.760
1	Sambas	2019	1.835.021.132	43.840
2	Bengkayang	2019	1.001.490.485	17.690
3	Sintang	2019	2.064.531.362	40.300
4	Sanggau	2019	1.590.584.161	21.400
5	Kapuas Hulu	2019	1.805.354.473	25.220
1	Sambas	2020	1.835.021.133	41.410
2	Bengkayang	2020	1.001.490.485	17.110
3	Sintang	2020	2.064.531.362	39.190
4	Sanggau	2020	1.590.584.161	21.160
5	Kapuas Hulu	2020	1.805.354.473	23.930
1	Sambas	2021	1.854.895.554	41.490
2	Bengkayang	2021	1.070.345.023	16.920
3	Sintang	2021	1.860.072.209	39.400
4	Sanggau	2021	1.296.485.705	21.700
5	Kapuas Hulu	2021	1.744.613.136	24.030
1	Sambas	2022	1.704.454.437	37.650
2	Bengkayang	2022	1.182.320.493	15.970
3	Sintang	2022	1.656.179.346	36.760
4	Sanggau	2022	1.602.519.411	21.740
5	Kapuas Hulu	2022	1.520.497.151	23.430

Sumber (BPS Kalimantan Barat, 2022)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kemiskinan. Namun, tingkat kemiskinan dari tahun 2013-2022 lebih banyak mengalami penurunan jumlah kemiskinan karena diakibatkan oleh meningkatnya anggaran pemerintah daerah yang terealisasi di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Secara efektif, otonomi daerah mulai dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari 2002. Dengan peraturan perundang-undangan ini, pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak kekuasaan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Ini memungkinkan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah mereka dan bekerja sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif yang berisi tentang sumber- sumber penerimaan wilayah serta pengeluaran wilayah dalam waktu satu tahun. Pada dasarnya, APBD merupakan salah satu alat yang bisa digunakan guna menaikkan pelayanan publik serta kesejahteraan warga, dan ini cocok dengan tujuan otomi wilayah yang luas, nyata, serta bertanggung jawab. (Mahkamah Konstitusi RI, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan pengujian dan penelitian terhadap pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan realisasi belanja daerah terhadap kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat memiliki

pengaruh atau tidak. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini tentang “Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2013-2022”.

LANDASAN TEORI

A. Realisasi dan Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo realisasi merupakan suatu langkah proses menjadikan nyata, perwujudan dan pelaksanaan yang nyata. Realisasi menurut Dedi Nordiawan merupakan suatu proses tahapan yang harus dilaksanakan agar menjadi nyata begitu juga dengan pelaksanaan agar realisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi, realisasi merupakan suatu hal yang harus di laksanakan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses dibutuhkan adanya pelaksanaan dan tindakan nyata agar terealisasikan sesuai dengan harapan (Siregar, 2021).

Menurut Priyo, pendapatan daerah bertanggung jawab atas belanja daerah. Variabel terikat, belanja, sangat bergantung pada sumber dana daerah. Baik berasal dari transfer yang salah dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam pengukurannya, ilusi fiskal terjadi ketika ada hubungan negatif antara variabel pendapatan dan variabel belanja. Belanja daerah dapat dibagi menjadi dua kategori: belanja langsung dan belanja tidak langsung, menurut Abdul Halim. Contoh belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial (Belanja PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT, dan bantuan sosial lainnya), belanja desa (Infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan), belanja bagi hasil (Dana yang diperoleh dari kerja sama dengan pemerintah), dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa. Sedangkan belanja langsung yaitu meliputi belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa (Yanti, 2020).

Belanja daerah ataupun disebut pula dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah(APBD) merupakan sesuatu aspek pendorong perkembangan ekonomi daerah. Dengan demikian belanja daerah diketahui selaku salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disamping pos pemasukan pemerintahan daerah. Semakin besar bertambahnya belanja daerah sehingga akan semakin menambah aktivitas kegiatan perekonomian daerah. Bagi Peraturan Menteri Dalam Negara No 30 Tahun 2006, pengeluaran dari rekening kas universal wilayah yang kurangi ekuitas dana lancar diduga sebagai belanja daerah. Ini menggambarkan bagian dari kewajiban wilayah sepanjang satu tahun anggaran yang tidak bisa dibayar kembali oleh daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan, 2022).

B. Kemiskinan

Menurut Undang- Undang No 4 tahun 2004, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi sosial ekonomi di mana seorang ataupun sekelompok orang tidak terpenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan serta meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia tercantum kebutuhan dasar seperti santapan, kesehatan, pembelajaran, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, lahan, sumber energi alam, area hidup, kebebasan dari perlakuan ataupun ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta politik. Bagi Profesor. Emil Salim berkata bahwa kemiskinan menggambarkan“ sesuatu keadaan yang menggambarkan bahwa minimnya pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama publik (Bur & Triani, 2019).

Selanjutnya, menurut Supriatna kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dimana semuanya terbatas hal ini terjadi bukan karena kemauan individu yang bersangkutan. Suatu penduduk dinyatakan miskin apabila dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas

kerja, pendapatan, kesehatan dan kesejahteraan hidup, yang menunjukkan tingkat ketidakmampuan. Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada baik melalui pendidikan formal maupun nonformal sehingga dapat menimbulkan permasalahan terhadap rendahnya pendidikan informal. Kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu : Pertama, kemiskinan absolut adalah ketika seseorang tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan standar hidup di wilayah tertentu (Kadji, 2022).

C. Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Belanja daerah yang terealisasi dengan baik dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, hal ini telah di buktikan oleh berbagai penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan. Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara belanja daerah dan tingkat kemiskinan adalah teori fiskal desentralisasi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Wallace E.Oates, dia berpendapat bahwa pemerintah daerah lebih mampu mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, termasuk program-program pengentasan kemiskinan (Firdaus & Beik, 2013). Selanjutnya menurut Rostow dan Musgrave mengatakan bahwa belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting sebagai percepatan dan akselerasi pembangunan aktivitas ekonomi ekonomi. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak belanja daerah yang terealisasi, maka tingkat kemiskinan juga akan berkurang karena meningkatnya aktivitas ekonomi produktif dari masyarakat (Wati, 2015). Menurut Keynes, perluasan atau penambahan belanja pemerintah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa peningkatan permintaan agregat menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi terealisasi. (Wahyudi, 2020).

KERANGKA BERPIKIR

Dalam kerangka berpikir ini, digunakan kerangka berpikir konseptual/ instan yang mempunyai makna bahwa bagaimana teori berhubungan dengan bermacam aspek yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan penting (Academia, 2023). Teori-teori tersebut akan diaplikasikan pada objek dan subjek penelitian untuk menjawab apakah ada pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2022. Secara konseptual, penelitian ini melihat bagaimana hubungan realisasi belanja daerah pada daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat sehingga hasil tersebut dapat menunjukkan apakah ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang digunakan peneliti adalah :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Dari kerangka berpikir diatas menjelaskan bahwa variabel X dari penelitian ini adalah Realisasi Belanja Daerah. Pengaruh tersebut merupakan salah satu elemen yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tersebut. Dari asumsi dasar teori tersebut,

peneliti ingin mengetahui apakah adanya pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2022 sebagai variabel Y.

HIPOTESIS

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap penelitian. Hipotesis penelitian menggambarkan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam suatu riset. dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan merupakan hipotesis asosiatif yang bertujuan guna mengetahui apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara 2 variabel yang hendak diteliti (Nasution, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Jadi, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H0: Tidak ada hubungan atau pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.

H1: Ada hubungan atau pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono menjelaskan jika tata cara penelitian kuantitatif berlandaskan pada positivisme(informasi nyata/ konkrit), dan data penelitian ini berbentuk angka yang bisa diukur dengan menggunakan statistik sebagai perlengkapan uji perhitungan serta terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti. Untuk memenuhi data riset, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bermacam data. Penelitian ini tercantum dalam jenis penelitian yang diketahui sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan fenomena yang terdapat secara beraturan ataupun sistematis, faktual, serta akurat. Penelitian ini menggambarkan variabel serta didukung dengan data angka yang dihasilkan dari kedua kondisi (Nugroho, 2013).

Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah masyarakat miskin di lima daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif menggunakan *Statistical Profram for Social Science* (SPSS). Dalam penelitian ini diambil data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan mengacu pada informasi yang didapatkan dari kepustakaan, studi dokumentasi, arsip, catatan-catatan, laporan penelitian terdahulu, Web Internet, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berasal dari website resmi Badan Pusat Statistika (data yang diperoleh berupa jumlah realisasi belanja daerah dan jumlah masyarakat miskin di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022), dari jurnal-jurnal penelitian (data yang diperoleh berupa referensi teori-teori), modul (data yang diperoleh berupa cara mengolah data) (Yasir dkk., 2021).

Untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan 2 variabel, yakni variabel independen (X) serta variabel dependen (Y). Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang menimbulkan terjadinya variabel dependen (Y), variabel bebas pada penelitian ini merupakan realisasi belanja daerah. Sebaliknya variabel dependen (Y) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan rancangan analisis regresi sederhana yang hendak menunjukkan seberapa besar pengaruh realisasi belanja daerah (X) selaku variabel bebas terhadap jumlah kemiskinan (Y) selaku variabel terikat.

HASIL ANALISIS

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas *Kolmogorof-Smirnov* digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8326,76088647
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,078
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance		

Sumber : (Data diolah SPSS 26)

Dari uji normalitas yang dilakukan, signifikansi senilai 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam variabel antara residual dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan bahwa variabel antara residual dari satu penelitian ke penelitian lainnya tidak sama. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk menguji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2548,023	2749,196		,927	,359
	REALISASI BELANJA DAERAH	2,983E-6	,000	,232	1,621	,112

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : (Data diolah SPSS 26)

Dari uji heteroskedastisitas yang dilakukan, mendapatkan hasil bahwa nilai signifikansi variabel X (Realisasi Belanja Daerah) adalah 0,112 > 0,05 yang menyatakan bahwa tidak



terjadi heteroskedastisitas, yang mengandung artian bahwa data tersebut tidak mengalami masalah sehingga dapat dengan mudah untuk mengukur standar deviasi yang sebenarnya.

3. Uji Autokorelasi

Dalam analisis regresi linier sederhana dan berganda, uji asumsi klasik termasuk uji autokorelasi. Tujuan dari uji auto korelasi adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pada periode t-1 dalam model regresi. Ada masalah atau masalah autokorelasi ketika ada korelasi.

Tabel 4.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,601 ^a	,361	,347	8416,78254	2,403
a. Predictors: (Constant), REALISASI BELANJA DAERAH					
b. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN					

Sumber : (Data diolah SPSS 26)

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

- n = 50
- d = 2,403
- dL = 1,503
- dU = 1,584
- 4 - dL = 4 - 1,503 = 2,497
- 4 - dU = 4 - 1,584 = 2,416

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa $1,584 < 2,403 < 2,416$ atau $d < 4 - d$, maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi.

Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan uji regresi sederhana yang diolah menggunakan *IBM SPSS Statistics 26*, dapat didapatkan hasil:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3071,884	5134,718		,598	,553
	Realisasi Belanja Daerah	-1,800E-5	,000	,601	5,099	,000
a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan						

Sumber : (Data diolah SPSS 26)

Berdasarkan tabel 1.5 dapat disimpulkan persamaan model regresi dalam penelitian ini yaitu $Y = 3071,884 + -1,800E-5X$. Adapun interpretasi persamaan model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 3071,884 memiliki artian bahwa jika realisasi belanja daerah (X) bernilai nol (0), maka prediksi jumlah kemiskinan (Y) sebesar 3071,884 ribu jiwa.



- b. Koefisien regresi variabel belanja daerah mempunyai nilai negatif sebesar $-1,800E-5X$ atau $-0,00001800$ menunjukkan bahwa apabila variabel belanja daerah meningkat sebesar satu satuan maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar $-1,800E-5X$ atau $-0,00001800$.

2. Uji t (Parsial)

Uji t pada regresi linier sederhana Uji t digunakan untuk menguji apakah model regresi pada realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara parsial. Berdasarkan tabel 1,5 hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa hasil uji t sebagai berikut:

Berdasarkan pada hasil signifikansi (sig) pada variabel realisasi belanja (X) menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga hasil tersebut dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang mengandung artian bahwa terdapat pengaruh signifikan antara realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan.

3. Uji f (Simultan)

Uji f pada regresi linier sederhana digunakan untuk menguji apakah model regresi pada realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara simultan. Adapun hasil uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1841908578,812	1	1841908578,812	26,000	,000 ^b
	Residual	3258742502,438	46	70842228,314		
	Total	5100651081,250	47			
a. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN						
b. Predictors: (Constant), REALISASI BELANJA DAERAH						

Sumber : (Data diolah SPSS 26)

Berdasarkan hasil uji f pada variabel independen yaitu realisasi belanja daerah menghasilkan nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa maka H0 diterima dan H1 ditolak yang mengandung artian bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,601 ^a	,361	,347	8416,78254	2,403
a. Predictors: (Constant), REALISASI BELANJA DAERAH					
b. Dependent Variable: TINGKAT KEMISKINAN					

Sumber : (Data diolah SPSS 26)

Pada analisis yang dilakukan, telah didapatkan hasil koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,361 yang mengandung pengertian bahwa realisasi belanja daerah (X) memiliki kontribusi sebesar 36,1% (rendah) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dan 63,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang digunakan dengan melakukan perhitungan uji regresi linier sederhana berpengaruh negatif (-) sebesar -0,00001800, yang artinya apabila realisasi belanja daerah naik sebanyak 1 satuan, maka jumlah kemiskinan menurun sebanyak 0,00001800 dan uji signifikansi parsial (uji t) pada variabel realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis H₀ ditolak dan H₁ diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Selanjutnya uji simultan (uji f) yang dilakukan mendapatkan nilai signifikansi (sig) yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa adanya pengaruh realisasi belanja daerah yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Selanjutnya pada uji koefisien determinasi yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil *R-Square* sebesar 0,361 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh realisasi belanja daerah (X) memiliki pengaruh sebesar 36,1% (rendah) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dan 63,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah diuraikan diatas, dimulai dari teori realisasi yang mengatakan bahwa realisasi merupakan suatu hal yang harus di laksanakan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses dibutuhkan adanya pelaksanaan dan tindakan nyata agar terealisasikan sesuai dengan harapan.

Tabel 1.8
(Data Realisasi Belanja dan Jumlah Kemiskinan Lima Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2022)

No	KAB/KOTA	TAHUN	Realisasi Belanja Daerah (Ribu Rupiah)	Jumlah Kemiskinan (Ribu jiwa)
1	Sambas	2013	1.039.619.502	51.200
2	Bengkayang	2013	620.299.719	18.400
3	Sintang	2013	1.075.556.247	39.000
4	Sanggau	2013	989.383.319	20.400
5	Kapuas Hulu	2013	1.046.895.750	26.400
1	Sambas	2014	1.174.144.328	49.300
2	Bengkayang	2014	806.042.638	16.900
3	Sintang	2014	1.141.361.438	35.700
4	Sanggau	2014	1.053.233.782	19.700
5	Kapuas Hulu	2014	1.166.456.511	24.300
1	Sambas	2015	1.511.634.278	49.290
2	Bengkayang	2015	1.063.661.124	16.490

3	Sintang	2015	1.700.909.625	36.830
4	Sanggau	2015	1.362.317.621	20.260
5	Kapuas Hulu	2015	1.568.656.547	23.740
1	Sambas	2016	1.421.885.401	44.880
2	Bengkayang	2016	899.326.378	18.040
3	Sintang	2016	1.481.302.835	40.360
4	Sanggau	2016	1.663.612.737	20.270
5	Kapuas Hulu	2016	1.421.570.043	24.490
1	Sambas	2017	1.638.897.259	45.420
2	Bengkayang	2017	1.089.672.442	18.840
3	Sintang	2017	1.884.197.672	41.460
4	Sanggau	2017	1.535.396.866	20.620
5	Kapuas Hulu	2017	1.651.954.428	23.960
1	Sambas	2018	1.701.221.066	45.480
2	Bengkayang	2018	1.003.654.006	17.940
3	Sintang	2018	1.870.318.612	42.650
4	Sanggau	2018	1.500.872.589	21.590
5	Kapuas Hulu	2018	1.722.177.313	24.760
1	Sambas	2019	1.835.021.132	43.840
2	Bengkayang	2019	1.001.490.485	17.690
3	Sintang	2019	2.064.531.362	40.300
4	Sanggau	2019	1.590.584.161	21.400
5	Kapuas Hulu	2019	1.805.354.473	25.220
1	Sambas	2020	1.835.021.133	41.410
2	Bengkayang	2020	1.001.490.485	17.110
3	Sintang	2020	2.064.531.362	39.190
4	Sanggau	2020	1.590.584.161	21.160
5	Kapuas Hulu	2020	1.805.354.473	23.930
1	Sambas	2021	1.854.895.554	41.490
2	Bengkayang	2021	1.070.345.023	16.920
3	Sintang	2021	1.860.072.209	39.400
4	Sanggau	2021	1.296.485.705	21.700
5	Kapuas Hulu	2021	1.744.613.136	24.030
1	Sambas	2022	1.704.454.437	37.650
2	Bengkayang	2022	1.182.320.493	15.970
3	Sintang	2022	1.656.179.346	36.760
4	Sanggau	2022	1.602.519.411	21.740
5	Kapuas Hulu	2022	1.520.497.151	23.430

Sumber (BPS Kalimantan Barat, 2022)

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah di lima daerah perbatasan mengalami kenaikan, namun ada juga penurunan. Namun lebih dominan pengeluaran pemerintah yang terealisasikan di lima daerah mengalami peningkatan sehingga mampu menurunkan jumlah kemiskinan di lima daerah perbatasan. Pada penelitian

ini, hasilnya sesuai dengan teori yang diambil. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak dana belanja daerah yang terealisasi semakin banyak pula berkurangnya jumlah kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Selanjutnya, belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi belanja langsung dan tidak langsung memberikan hasil yang baik bagi daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat karena berdasarkan penelitian ini realisasi belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.

Hasil penelitian ini signifikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Lutfi Maulana Hasanudin dengan judul “Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Daerah, Besaran UMK, Inflasi, dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2017”, mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Selanjutnya penelitian oleh Wahyudi dengan judul “Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, yang mendapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah provinsi yang terealisasi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Selanjutnya, oleh Helmi Winda Wati dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)”, mendapatkan hasil bahwa variabel belanja daerah yang terealisasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan, yang mana penelitian terdahulu tersebut memiliki hasil yang sama terhadap penelitian yang telah dilakukan.

Teori pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa teori tersebut mengatakan bahwa belanja daerah yang terealisasi dengan baik dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang direalisasikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. dan penelitian ini mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Teori ini terbukti karena pada realisasi belanja daerah atau pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan di lima daerah perbatasan ini, maka kemiskinan juga menurun. Hal ini membuktikan bahwa realisasi belanja daerah mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang terjadi di lima daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022.

PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022. Berdasarkan olahan data dari penelitian yang telah dilakukan bahwa hubungan pengaruh realisasi belanja daerah terhadap tingkat kemiskinan berhubungan negatif. Yang artinya semakin tinggi realisasi belanja daerah di daerah perbatasan, maka tingkat kemiskinan akan berkurang di daerah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia, A. (2023). Kerangka Pemikiran Konseptual dan Teoritis dalam Skripsi [Blog]. *Ascarya Solution*. <https://ascarya.or.id/kerangka-pemikiran/>
- Ananda Ashari, I., Sukmawati Sulia, U., & Kidrian, E. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019*. 04(02), 429–452. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/910/727>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan. (2022). *Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lebih Dekat (Bagian 1)*. Tim IT BPKAD Kuningan. <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1>
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. 29 Januari 2017, 01(01), 53. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/download/18331/15483>
- BPS Kalimantan Barat. (2022). *Data Realisasi Belanja Daerah dan Jumlah Kemiskinan Lima Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2022*. <https://kalbar.bps.go.id/>
- Bur, R. F. Y., & Triani, M. (2019). *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat*. 01(02), 451–460. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 1, Nomor ... Universitas Negeri Padang [https://ejournal.unp.ac.id > article > download](https://ejournal.unp.ac.id/article/download)
- DoLab. (2021, Februari 7). Pengolahan Data Statistik Parametrik dan Non-Parametrik [Blog]. *DoLab AI-Powered Learning*. <https://dqlab.id/pengolahan-data-statistik-parametrik-dan-non-parametrik>
- Firdaus, M., & Beik. (2013). *Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*. 16(02), 129–156. <https://www.bmebi.org/index.php/BEMP/article/view/279/276>
- Hasanudin, M. L. M. (2019). *Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Daerah, Besaran UMK, Inflasi, dan PDRB Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2017* [Skripsi]. UIN Sunan Kalijaga.
- Kadji, Y. (2022). *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. 01. <https://123dok.com/document/q7w9ee0n-yulianto-kemiskinan-konsep-teoritisnya-jurnal-ekonomi-universitas-gorontalo.html>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Uji Heteroskedastisitas [Blog]. kemdikbud.go.id. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/559876/mod_folder/content/0/pertemuan%208%20uji%20heteroskedastisitas.pdf?forcedownload=1
- Kurnia, U. (2023). Interpretasi Koefisien Korelasi Pearson di SPSS [Blog]. *Restat*. <https://blog.restatolahdata.id/interpretasi-korelasi-pearson-spss/>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2022). *Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>
- Mardiatmoko, G. (2020). *Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]*. 14(03), 333–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>

- Nasution, A. (2020). *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik 2020*. 4–5. https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_Pengujian%20Hipotesis_Dr.%20Ahmadriswan%20Nasution,%20S.Si,%20MT._2119.pdf
- Novianti, & Sari, N. I. (2023). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan untuk Mengentaskan Kemiskinan di Desa Lumbang Dusun Penyengat Kecamatan Sambas. *17 September 2023, 01(02)*, 71. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v1i2.138>
- Nugroho, A. (2013). *Pengaruh Motivasi dan Minat Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu*. 25–39. Skripsi Pengaruh Motivasi Dan Minat Terhadap ... uny.ac.id <http://eprints.uny.ac.id> > ...
- Pemerintah Provinsi Kalbar. (2019). *Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat*. KalbarProv CSIRT. <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>
- Pemerintah Provinsi Kalbar. (2022). *Gubernur Sutarmidji Dorong Percepatan Pembangunan Perbatasan di Kalbar*. KalbarProv CSIRT. <https://kalbarprov.go.id/berita/gubernur-sutarmidji-dorong-percepatan-pembangunan-perbatasan-di-kalbar.html>
- Putri, R. A., Zamzami, & Rahmadi, S. (2021). *Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. *10(02)*, 107. <https://www.online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/view/12858>
- Siregar, N. K. (2021). *Efisiensi Realisasi Anggaran Biaya Produksi Produk Bius UD*. Pekanbaru [Skripsi, Universitas Medan Area]. Nurul Khaidah Siregar-Efisiensi Realisasi Anggaran Biaya Universitas Medan Area <https://repositori.uma.ac.id> > jsui > bitstream
- Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Wahyudi.pdf>
- Wati, H. W. (2015). *Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1947>
- Yanti, W. N. (2020). *Analisis Pengaruh Belanja Terhadap Pendapatan Asli di Provinsi Riau* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/10469/1/165110152.pdf>
- Yasir, A., Sukmawati Sulia, U., Ananda Ashari, I., & Karisma. (2021). *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan*. *07(02)*, 63–64. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/405>
- Yulianto, T. (2023). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Prov. Sulteng. <https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>
- Yuliara, I. M. (2016). *Regresi Linear Sederhana* (hlm. 1–6) [Tugas]. Universitas Udayana.

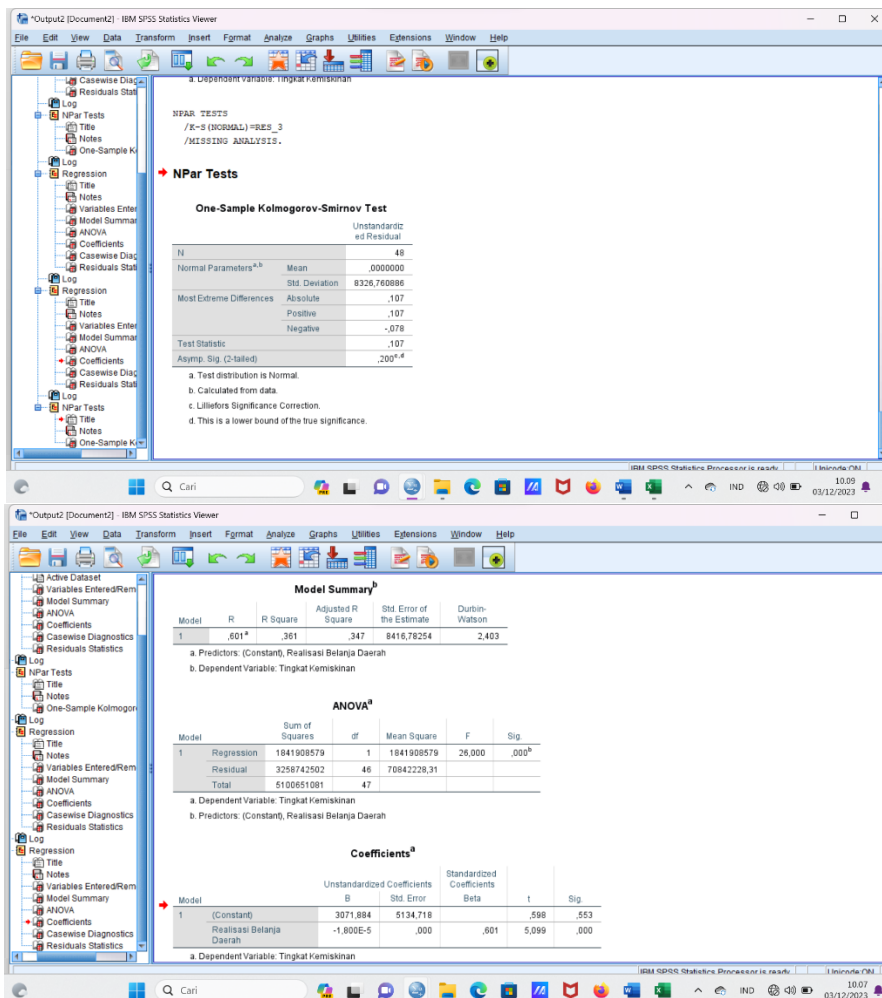
Lampiran :

1. Data Realisasi belanja daerah dan tingkat kemiskinan di daerah perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2022

No	KAB/KOTA	TAHUN	Realisasi Belanja Daerah (Ribu Rupiah)	Jumlah Kemiskinan (Ribu jiwa)
1	Sambas	2013	1.039.619.502	51.200
2	Bengkayang	2013	620.299.719	18.400
3	Sintang	2013	1.075.556.247	39.000
4	Sanggau	2013	989.383.319	20.400
5	Kapuas Hulu	2013	1.046.895.750	26.400
1	Sambas	2014	1.174.144.328	49.300
2	Bengkayang	2014	806.042.638	16.900
3	Sintang	2014	1.141.361.438	35.700
4	Sanggau	2014	1.053.233.782	19.700
5	Kapuas Hulu	2014	1.166.456.511	24.300
1	Sambas	2015	1.511.634.278	49.290
2	Bengkayang	2015	1.063.661.124	16.490
3	Sintang	2015	1.700.909.625	36.830
4	Sanggau	2015	1.362.317.621	20.260
5	Kapuas Hulu	2015	1.568.656.547	23.740
1	Sambas	2016	1.421.885.401	44.880
2	Bengkayang	2016	899.326.378	18.040
3	Sintang	2016	1.481.302.835	40.360
4	Sanggau	2016	1.663.612.737	20.270
5	Kapuas Hulu	2016	1.421.570.043	24.490
1	Sambas	2017	1.638.897.259	45.420
2	Bengkayang	2017	1.089.672.442	18.840
3	Sintang	2017	1.884.197.672	41.460
4	Sanggau	2017	1.535.396.866	20.620
5	Kapuas Hulu	2017	1.651.954.428	23.960
1	Sambas	2018	1.701.221.066	45.480
2	Bengkayang	2018	1.003.654.006	17.940
3	Sintang	2018	1.870.318.612	42.650
4	Sanggau	2018	1.500.872.589	21.590
5	Kapuas Hulu	2018	1.722.177.313	24.760
1	Sambas	2019	1.835.021.132	43.840
2	Bengkayang	2019	1.001.490.485	17.690
3	Sintang	2019	2.064.531.362	40.300
4	Sanggau	2019	1.590.584.161	21.400
5	Kapuas Hulu	2019	1.805.354.473	25.220

1	Sambas	2020	1.835.021.133	41.410
2	Bengkayang	2020	1.001.490.485	17.110
3	Sintang	2020	2.064.531.362	39.190
4	Sanggau	2020	1.590.584.161	21.160
5	Kapuas Hulu	2020	1.805.354.473	23.930
1	Sambas	2021	1.854.895.554	41.490
2	Bengkayang	2021	1.070.345.023	16.920
3	Sintang	2021	1.860.072.209	39.400
4	Sanggau	2021	1.296.485.705	21.700
5	Kapuas Hulu	2021	1.744.613.136	24.030
1	Sambas	2022	1.704.454.437	37.650
2	Bengkayang	2022	1.182.320.493	15.970
3	Sintang	2022	1.656.179.346	36.760
4	Sanggau	2022	1.602.519.411	21.740
5	Kapuas Hulu	2022	1.520.497.151	23.430

2. Hasil olahan data menggunakan SPSS 26



3. Tabel Durbin Watson

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671